

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Konteks Penelitian**

Pendidikan adalah tanggung jawab bersama pemerintah, orang tua, dan masyarakat. Tujuannya adalah untuk meningkatkan mutu pembelajaran pada setiap siswa. Komite sekolah merupakan badan independen yang menampung peran masyarakat dalam meningkatkan mutu pendidikan dan pengajaran pada setiap siswa untuk memastikan adanya keadilan dalam penyediaan layanan pendidikan serta efisiensi layanan pendidikan di sekolah.

Dalam sistem Pendidikan Nasional sekolah merupakan unit pelaksanaan kegiatan pendidikan. Sekolah sebagai institusi pendidikan memiliki sistem yang kompleks dan dinamis sehingga memerlukan manajemen yang profesional didalamnya terdapat komponen guru, siswa, dan para staf non guru yang masing-masing mempunyai tugas tertentu dalam mewujudkan program pendidikan yang telah ditetapkan.

Fungsi dan peran komite di samping sebagai institusi pendidikan juga merupakan salah satu institusi sosial karena sekolah merupakan masyarakat kecil yang mempunyai kebudayaan (kultur) tertentu yang akan melahirkan suasana atau iklim sosial yang akan mempengaruhi proses pembelajaran. Kegiatan pembelajaran tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat di mana kegiatan tersebut berlangsung, sehingga sekolah dan masyarakat saling membutuhkan sebagai salah satu lembaga layanan terhadap pendidikan masyarakat, yang tentunya membawa konsekuensi-konsekuensi konseptual dan teknis antara fungsi pendidikan yang digunakan oleh sekolah dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Komite sekolah dibentuk oleh sekolah dan masyarakat yang anggotanya yang dipilih dari unsur sekolah dan masyarakat. Komite sekolah harus membangun visi, misi, nilai-nilai kepercayaan, kebijakan-kebijakan serta prosedur yang dilaksanakan oleh sekolah peran

komite sangat diharapkan didalam melaksanakan roda pendidikan di sekolah. Hubungan sekolah dan masyarakat pada hakikatnya merupakan suatu sarana yang sangat berperan dalam membina dan mengembangkan pertumbuhan pribadi siswa di sekolah, dalam hal ini sekolah sebagai sistem sosial merupakan bagian integral dari sistem sosial yang lebih besar, yaitu masyarakat dan komite sekolah sangat berperan didalam peningkatan mutu pendidikan di sekolah.

Dengan demikian sekolah memiliki kewenangan untuk melakukan pengelolaan dan pengendalian sistem pelayanan pendidikan kepada masyarakat. Hubungan sekolah dan masyarakat bertujuan antara lain untuk: (1) memajukan kualitas pembelajaran dan pertumbuhan siswa, (2) memperkokoh tujuan serta meningkatkan kualitas hidup dan penghidupan masyarakat, (3) menggairahkan masyarakat untuk menjalin hubungan dengan sekolah. Untuk merealisasikan tujuan tersebut sekolah dapat menarik simpati masyarakat dalam menjalin hubungan sekolah dengan masyarakat antara lain memberitahukan kepada masyarakat mengenai program-program sekolah, baik program yang telah dilaksanakan, yang sedang dilaksanakan, maupun yang akan dilaksanakan sehingga masyarakat mendapat gambaran yang jelas tentang perkembangan sekolah. Masyarakat dalam hal ini merupakan pengguna jasa sekolah yang sudah seharusnya ditempatkan pada posisi yang setara dalam proses pengelolaan dan pengendalian mutu pendidikan di sekolah. Masyarakat perlu diberikan kepuasan sbagai pengguna jasa pendidikan, kerana peran aktifnya dalam dunia pendidikan merupakan bukti aktualisasi kepekaan dan tanggung jawabnya untuk merintis, mengelolah dan menciptkan kualitas pendidikan. Dalam konteks ini sekolah dapat bekerja sama dengan masyarakat untuk melahirkan berbagai kebijakan bagi peningkatan penyelenggaraan pendidikan di sekolah.

Hubungan yang harmonis antara sekolah dan masyarakat ini semakin dirasakan pentingnya pada masyarakat yang telah menyadari dan memahami pentingnya pendidikan

bagi siswa. Hubungan sekolah dengan masyarakat berjalan dengan baik, rasa tanggung jawab dan partisipasi masyarakat untuk memajukan sekolah juga akan baik. Agar terciptanya hubungan dan kerja sama yang baik antara sekolah dan masyarakat perlu mengetahui gambaran yang jelas tentang program yang ada di sekolah. Gambaran dan kondisi sekolah ini dapat dikonfirmasi kepada masyarakat melalui laporan kepada orang tua siswa, buletin bulanan, penerbit surat kabar, pameran sekolah dan kunjungan sekolah dan lain sebagainya.

Keterlibatan masyarakat sangat berperan dalam mengembangkan dan memajukan pendidikan di sekolah. Sehingga organisasi sekolah harus bersifat fungsional dengan kondisi masyarakat sekitarnya, agar dapat mewadahi berbagai kegiatan yang dapat mendekatkan sekolah dengan masyarakat atau sebaliknya, karena organisasi yang fungsional itu memungkinkan setiap personal mewujudkan potensi secara maksimal melalui kegiatan-kegiatan yang kreatif dengan memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang terdapat di masyarakat sekitar. Dengan demikian sekolah akan dapat memetik manfaat dari kehidupan masyarakat sekitarnya dan sebaliknya masyarakat akan memperoleh manfaat dari kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh sekolah.

Kepala sekolah yang baik merupakan salah satu kunci untuk bisa menciptakan hubungan yang baik antara sekolah dan masyarakat secara efektif karena harus menaruh perhatian tentang apa pada siswa di sekolah dan apa saja yang dipikirkan orang tua tentang sekolah. Kepala sekolah dituntut senantiasa berusaha membina dan meningkatkan hubungan kerja sama yang baik antara sekolah dan masyarakat guna mewujudkan sekolah yang efektif dan efisien. Hubungan yang harmonis ini akan membentuk: (1) saling pengertian antara sekolah, orang tua dan masyarakat dan lembaga-lembaga lain yang ada di masyarakat, termasuk dunia kerja, (2) saling membantu antara sekolah dan masyarakat karena mengetahui manfaat, arti serta pentingnya peranan masing-masing, (3) kerja sama di masyarakat dan mereka merasa ikut bertanggung jawab atas suksesnya pendidikan di sekolah.

Hubungan timbal balik antara sekolah dan masyarakat, menurut Haryadi, dkk (2006:34) paling tidak bisa dilihat dari segi yaitu: (1) peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, dan melakukan kontrol sosial terhadap pelaksanaan pendidikan, (2) menempatkan sekolah sebagai pelaku sentral dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan, yang bersifat inklusif, sehingga institusi pendidikan sekolah diharapkan pula menjadi miliki masyarakat, (3) meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pendidikan dan program masyarakat.

Hubungan timbal balik tersebut bagi sekolah akan sangat bermanfaat untuk memperoleh dukungan dan bantuan dalam usaha mengembangkan dan melaksanakan program sekolah yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sedangkan bagi masyarakat hubungan tersebut akan bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan hidup masyarakat kerana masyarakat akan menerima kembali anggota-anggota masyarakat yang makin meningkat kemampuan dan keterampilan mereka.

Peran serta masyarakat tersebut merupakan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang diwujudkan dalam wadah komite sekolah sebagai lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali siswa, komunitas sekolah serta tokoh masyarakat, dengan tujuan utama ikut meningkatkan tanggung jawab dan peran aktif dari seluruh lapisan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan, dan berfungsi memberikan pertimbangan dalam rangka memberdayakan dan menjamin kualitas pendidikan di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota.

Komite sekolah sendiri diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No.044/U/2002 tanggal 2 April 2002, yang memiliki peran sebagai berikut: (1) pemberi pertimbangan (*advisory agency*), (2) pendukung kegiatan (*supporting agency*), (3) pengontrol kegiatan pendidikan (*controlling agency*), (4) mediator atau penghubung atau pengait tali komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah.

Agar peran komite sekolah tersebut dapat mendukung upaya pemerintah dalam meningkatkan penyelenggaraan pendidikan, maka Komite Sekolah perlu diberdayakan untuk melaksanakan peran dan fungsi secara optimal yang sejalan dengan kondisi dan permasalahan lingkungan masing-masing sekolah. Dalam konteks ini Komite Sekolah hendaknya dapat menampung dan menganalisis aspirasi masyarakat serta mendorong orang tua siswa dalam meningkatkan penyelenggaraan pendidikan. Komite sekolah untuk mengadakan sumber-sumber daya pendidikan dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan dapat mengelolah serta memberikan fasilitas bagi guru-guru dan siswa-siswa untuk belajar sebanyak mungkin sehingga pembelajaran menjadi efektif. Komite sekolah akan dibentuk bersama siswa untuk melihat bagaimana proses pembelajaran yang terjadi di sekolah yang dapat meningkatkan mutu pendidikan di sekolah terutama dari segi kualitas Output yang diharapkan oleh sistem pendidikan pada umumnya dan tujuan sekolah pada khususnya.

Dengan demikian Komite sekolah sebagai wadah independen yang beranggotakan semua unsur dan stakeholder pendidikan berperan bukan hanya sebagai penyandang dana operasional sekolah seperti yang selama ini dilakukan, melainkan turut memikirkan realitas sekolah yang penuh dengan inisiatif dan kreativitas. Semua kegiatan baik pengambilan keputusan dari perencanaan hingga pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pendidikan sepenuhnya berasal dari inisiatif sekolah itu sendiri. Sehingga komite sekolah harus menjadi wadah mendukung terwujudnya kemandirian sekolah.

Dengan demikian komite sekolah sebagai wadah independen yang beranggotakan semua unsur dan *stakeholder* pendidikan berperan bukan hanya sebagai peyandang dana operasional sekolah seperti yang selama ini dilakukan, melainkan turut memikirkan realitas sekolah yang penuh dengan inisiatif dan kreativitas. Semua kegiatan pengambilan keputusan dari perencanaan hingga pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pendidikan sepenuhnya

berasal dari inisiatif sekolah itu sendiri. Sehingga komite sekolah harus menjadi wadah mendukung terwujudnya kemandirian sekolah.

Komite sekolah sebagai bagian internal sekolah mempunyai pengaruh besar terutama dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan proses penyelenggaraan pendidikan dalam hal memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi seperti menyangkut: (1) kebijakan dan program pendidikan, (2) kriteria kinerja pendidikan, (3) kriteria tenaga pendidikan termasuk kepala sekolah, (4) kriteria sarana dan prasarana pendidikan dan berbagai kebijakan pendidikan lainnya, yang sesuai dengan pola manajemen berbasis sekolah (MBS). Yang dalam aspek teknis edukatif dikenal dengan manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah (MPMBS)

Adanya sinergi antara sekolah dan komite sekolah menyebabkan lahirnya tanggung jawab bersama antara sekolah dan masyarakat sebagai mitra kerja dalam membangun pendidikan. Dari sini masyarakat akan dapat menyalurkan berbagai ide dan partisipasinya dalam memajukan pendidikan di daerahnya.

Namun berdasarkan observasi awal peneliti lakukan di sekolah SDN Teratai Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato penulis menemukan bahwa peran komite sekolah yang ada di SDN Teratai kurang difungsikan hanya merupakan pelengkap dari organisasi sekolah yang ditunjukkan oleh gejala: pertama kurangnya keterlibatan sekolah dengan komite dalam pelaksanaan program-program sekolah, kedua kurangnya sosialisai sekolah terhadap orang tua siswa dan masyarakat terhadap perkembangan sekolah, ketiga, masih rendahnya pemahaman orang tua siswa dan masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan, keempat peran komite di sekolah hanya terbatas pada pengumpulan dana, pengurus komite sekolah belum dapat mengambil inisiatif sendiri dalam pengambilan keputusan karena tidak dilibatkan oleh sekolah dalam pengambilan keputusan serta

pelaksanaan program-program sekolah semuanya diputuskan oleh kepala sekolah tanpa melibatkan personil dari orang tua siswa termasuk komite sekolah

Berdasarkan realitas yang dikemukakan di atas, dapat dikatakan bahwa peran komite serta keterlibatan sebagai pengurus komite sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan belum maksimal dilibatkan dalam pelaksanaan roda pendidikan, sehingga perlu kirannya dilakukan pengkajian secara ilmiah melalui suatu penelitian yang berjudul: “**Peran Komite Sekolah dalam Peningkatan Mutu Pendidikan di SDN Teratai Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato.**”

## **B. Fokus Penelitian.**

Berdasarkan konteks penelitian di atas, maka menjadi fokus penelitian adalah sebagai berikut:

1. Peran Komite Sekolah sebagai badan pertimbangan (*advisory agency*) dalam peningkatan mutu pendidikan di SDN Teratai Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato
2. Peran Komite Sekolah sebagai Pendukung (*supporting agency*) dalam peningkatan mutu pendidikan di SDN Teratai Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato
3. Peran Komite sekolah sebagai pengawas (*controlling agency*) dalam peningkatan mutu pendidikan di SDN Teratai Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato
4. Peran Komite Sekolah sebagai badan mediator (*mediator agency*) dalam peningkatan mutu pendidikan di SDN Teratai Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui gambaran peran Komite Sekolah sebagai badan pertimbangan (*advisory agency*) dalam peningkatan mutu pendidikan di SDN Teratai Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato
2. Untuk mengetahui gambaran peran Komite Sekolah sebagai Pendukung (*supporting agency*) dalam peningkatan mutu pendidikan di SDN Teratai Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato
3. Untuk mengetahui gambaran peran Komite sekolah sebagai pengawas (*controlling agency*) dalam peningkatan mutu pendidikan di SDN Teratai Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato
4. Untuk mengetahui gambaran peran Komite Sekolah sebagai badan mediator (*mediator agency*) dalam peningkatan mutu pendidikan di SDN Teratai Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian sebagai berikut:

1. Untuk Kepala Sekolah sebagai bahan pertimbangan didalam mengambil keputusan supaya dapat melibatkan seluruh stakeholder termasuk komite sekolah dalam peningkatan mutu pendidikan di sekolah
2. Untuk pengurus komite sekolah dasar untuk dapat menunjukan eksistensinya sebagai lembaga pendamping yang ada di sekolah supaya dapat memiliki kepedulian terhadap peningkatan mutu pendidikan
3. Untuk yang berwenang termasuk personil yang bertanggung jawab dalam pendidikan untuk lebih meningkatkan peran serta komite sekolah dalam

penyelenggaraan pendidikan terutama dalam meningkatkan mutu pendidikan di sekolah dasar.